

I

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13	14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31							

HALAMAN : 8

TAHUN 2007

# Protesters say no to nuclear power plant

Suherdjoko  
*The Jakarta Post/Kudus*

**H**undreds of protesters took to the streets in Kudus regency, Central Java, on Tuesday to reject the central government's plan to build a nuclear power plant in nearby Jepara regency.

The protest by some 3,000 people was supported by Kudus regency administration officials, including Kudus regent Muhammad Tamzil, legislative council speaker Asrofi, military commander Lt. Col. Priyo Jatmiko and police chief Sr. Comr. Iswadi.

"I reject the plans to develop a nuclear-based power plant. People have rejected the plan. I'll send a letter on the Kudus people's rejection of the plan to the central government," Muhammad Tamzil said.

He said the plan was made

without agreement from residents. "That's why I support Kudus people's wishes," he said.

Protest coordinator Mochammad As'ad said the nuclear power plant could have disastrous consequences.

"We want the government, especially President Susilo Bambang Yudhoyono, to drop the plan to construct the Muria nuclear power plant," As'ad said.

An activist from the Indonesian Forum for the Environment, Arif Zayyn, said people were protesting against the plan for several reasons, such as the country's already abundant natural resources.

"Moreover, the technology to be used in this nuclear power plant is a pressurized water reactor, old reactor technology whose safety is questionable," Arif said.

He said that a 1,000 megawatt-capacity nuclear

power plant would need four million liters of water to cool it every minute, a demand that could threaten local marine life and the fishing industry.

"The dangerous thing is, if the (water) needed to cool it off is not enough, it might trigger the meltdown of the reactor, which might then cause a leak. Radiation from the 239 plutonium might spread to as far as Southeast Asia," he warned.

The central government is planning to construct the nuclear power plant in stages, to eventually produce 4,000 megawatts. The first phase of the power plant is expected to be completed in 2016 and produces 1,000 megawatts to supply Java, Bali and Madura.

Apart from the massive protests in the heart of Kudus city, a similar protest was also held outside the Kudus Legislative Council building.



**A LOOMING SPECTER:** Protesters in Kudus regency, dressed like ghosts, reject plans to build a nuclear power plan in the area.

*JP/Suherdjoko*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

## PLN Hambat Industri Tekstil Bangun Pembangkit

### NERACA

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai menghambat kalangan industri tekstil dan produk tekstil untuk membangun pembangkit listrik sendiri. Padahal, pemerintah tengah menggalakkan kalangan industri khususnya TPT mengembangkan pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan bahan bakar alternatif yaitu batu bara.

Demikian diungkap oleh Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy, di Jakarta, Senin.

Hambatan tersebut tampak dari adanya sejumlah persyaratan yang ditetapkan PLN bagi industri TPT yang akan membangun pembangkit. Salah satunya harus memiliki ijin usaha kelistrikan sendiri. "Mengurus syarat perijinan ini yang sangat susah. Pokoknya semua per-

syarat PLN itu sangat memberatkan sehingga kami tidak mungkin mengembangkan pembangkit sendiri," ujarnya.

Menurut Ismy, persyaratan yang dinilainya memberatkan itu antara lain kewajiban membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU) sebesar 2,5 persen untuk industri yang sudah menggunakan listrik dari pembangkit sendiri.

Selain itu, PLN juga mengeluarkan syarat bahwa penggunaan pembangkit tidak boleh paralel dengan yang dimiliki PLN.

Bila ketahuan, industri TPT yang memiliki pembangkit paralel dengan yang dimiliki PLN akan dikenakan sanksi lima kali lipat dari tarif dasar. "Bila seluruh persyaratan itu dipenuhi berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil. Padahal, industri ini menyumbang 25 persen dari surplus perdag-

an Indonesia 2005," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada sekitar 10 industri TPT di Bandung, Jawa Barat, mengembangkan pembangkit berbahan bakar batu bara dengan total kapasitas sekitar 226 megawatt. Dengan investasi untuk pembangkit batu bara itu sebesar 800 ribu dolar AS per satu mega watt API menghitung pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang dibangun 10 industri TPT itu mampu menghemat operasionalisasi PLN sebesar 226 megawatt.

Hal lain yang dikeluhkan API adalah kebijakan PLN lainnya mengenai program Daya Max Plus dan tarif multiguna yang memberatkan industri TPT karena harus mengalihkan pemakaian listriknya di luar waktu beban puncak.

"Dulu PLN berjanji kebijakan Daya Max akan dicabut, ternyata masih berlaku," ujarnya Ismy. ● Kamsari/Ant

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : 4											TAHUN 2007

HUDI HASTOWO, KEPALA BATAN:

## Tak Perlu Ada Demo

MESKI mendapat penolakan keras dari masyarakat, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ngotot membangun PLTN. Bahkan, proyek itu akan ditenderkan secara internasional setelah keluar keputusan presiden. "Kontrak proyek menunggu proses tender internasional. Dasar hukumnya menunggu Keppres Perencanaan Pembangunan PLTN," kata Kepala BATAN Hudi Hastowo usai bertemu dengan Bupati Jepara, Senin lalu (11/6).

Menurut Hudi, Keppres merupakan salah satu syarat dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Jika operasi pada 2016 atau 2017, lanjutnya, maka pembangunan fisik bisa dimulai empat tahun sebelumnya.

Hudi menyebutkan sejumlah negara telah mengajukan diri sebagai peserta tender yakni AS, Jepang, Korea Selatan dan Rusia untuk membangun reaktor dengan kapasitas 1.000 megawatt elektrik. Investasi diperkirakan sebesar 1,5 miliar dolar AS.

Hudi mengakui posisi Batan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang menjadi promotor dan akan menyiapkan strategi kebijakan nuklir. "Kami hanya butuh sosialisasi yang lebih kepada masyarakat agar informasi yang diterima bukan kekhawatiran dampak buruknya saja," ucap Hudi.

Mengenai temuan ahli geologi bahwa punggung Muria hingga pesisir pulau Jawa terdapat patahan bumi sebagai imbas aktivitas tektonik, Hudi mengelak. "Buktikan saja itu. Kalau terbukti, tak perlu ada demo. Batan akan merekomendasikan PLTN tak akan dibangun di Jepara," tegasnya.

Menurut rencana Batan, pada 2015-2016 PLTN Muria sudah bisa beroperasi dengan kapasitas 1.000 Mw dengan investasi 1.500 sampai 1.800 dolar AS per KWh. Harga listrik yang dihasilkan akan lebih murah yakni antara 3,5 sampai 4 sen dolar per Kwh. ■ AUL

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

● BISNIS INDONESIA  
○ INVESTOR DAILY  
○ KOMPAS  
○ KORAN TEMPO  
○ MEDIA INDONESIA  
○ NERACA  
○ PIKIRAN RAKYAT  
○ RAKYAT MERDEKA  
○ REPUBLIKA  
○ SUARA KARYA

○ SEPUTAR INDONESIA  
○ SUARA PEMBARUAN  
○ SINAR HARAPAN  
○ TABLOID KONTAN  
○ THE JAKARTA POST  
○ MAJALAH GATRA  
○ MAJALAH TEMPO  
○ MAJALAH TRUST  
○

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

## Pembangkit GT 22 di Sumbagut diperbaiki

BISNIS INDONESIA

MEDAN: PLN Pembangkitan Sumbagut akan melakukan pemeliharaan tahunan terhadap pembangkit GT 22 yang memiliki kapasitas 200 Mega Watt (MW) selama dua bulan, sehingga mereka melakukan pemadaman bergilir mulai 13 Juni-13 Agustus 2007.

General Manager PLN Pembangkitan Sumbagut Albert Pangaribuan mengungkapkan akibat pemeliharaan (*overhaul*) ini akan terjadi pengurangan daya 200 MW pada sistem kelistrikan di Sumbagut. Dalam kondisi normal, tambahnya, wilayah Sumbagut masih mengalami defisit sebesar 160 MW sehingga total defisit selama perbaikan menjadi 360 MW.

"Kami berusaha untuk pengurangan pasokan agar defisit itu tidak sampai sebesar itu. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas beberapa pembangkit kecil yang sebelumnya sudah mengalami pemeliharaan," katanya di sela-sela peresmian Pembangkit 15 MW yang disewa PLN dari PT Inti Duta di Belawan, kemarin.

Manajer Wilayah PLN Sumbagut Supriyanto mengungkapkan dengan peningkatan kapasitas beberapa pembangkit serta masuknya pasokan baru 15 MW, sistem kelistrikan Sumbagut akan mengalami defisit 100-120 MW.

Dengan besaran defisit tersebut, dia menjelaskan, mereka hanya melakukan pemadaman terhadap 39 grup. Dengan demikian, pelanggan umum akan mengalami pemadaman dua kali setiap hari masing-masing 4 jam setiap pemadaman.

"Tetapi perhitungan ini bisa juga berubah jika masyarakat bisa melakukan penghematan penggunaan energi listrik selama terjadinya pemeliharaan," kata Supriyanto.

Jika pelanggan bisa melakukan penghematan, tuturnya, defisit bisa berkurang menjadi 80 MW. Artinya pemadaman pada sebagian pelanggan ada yang hanya sekali sehari dan sebagian dua kali sehari.

Albert menjelaskan pemeliharaan atas pembangkit GT 22 merupakan sesuatu yang rutin dilakukan terhadap pembangkit untuk menjaga kondisi pembangkit tersebut. "Kami minta pelanggan maklum."

Menurut dia, permasalahan kelistrikan di Sumut merupakan akibat dari perubahan UU Kelistrikan yang dilakukan pada 2000, dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi.

Dengan UU baru itu, PLN tidak bias melakukan pembangunan pembangkit dalam beberapa tahun. Setelah dibatalkan UU tersebut barulah PLN kembali membangun pembangkit.

Pada 2009, menurut Albert, krisis listrik di Sumut akan teratasi dengan masuknya pasokan dari beberapa pembangkit di Sumut seperti Labuhan Angin dengan kapasitas 2X115 MW, PLTA Asahan 1 2X90 MW dan beberapa pembangkit PLN berbahan bakar MMO di Belawan berkapasitas 185 MW. (K9)



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

## PLN Dinilai Hambat Industri Tekstil

Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai sejumlah persyaratan yang ditetapkan PLN menghambat kalangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) membangun pembangkit listrik sendiri.

Padahal, pemerintah menggalakkan kalangan industri, khususnya TPT mengembangkan pembangkit listrik sendiri menggunakan bahan bakar alternatif, yaitu batu bara.

Sekretaris Eksekutif API Ernovian G Ismy, Senin (11/6), mengatakan industri TPT yang akan membangun pembangkit harus memiliki izin usaha kelistrikan sendiri.

"Mengurus syarat perizinan ini yang sangat susah. Pokoknya semua persyaratan PLN itu sangat memberatkan sehingga kami tidak mungkin mengembangkan pembangkit sendiri," ujarnya.

Persyaratan yang dinilai lainnya memberatkan itu antara lain kewajiban

membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU) sebesar 2,5 persen untuk industri yang sudah menggunakan listrik dari pembangkit sendiri.

Selain itu, PLN juga mengeluarkan syarat bahwa penggunaan pembangkit tidak boleh paralel dengan yang dimiliki PLN. Bila ketahuan, industri TPT yang memiliki pembangkit paralel dengan yang dimiliki PLN akan dikenai sanksi lima kali lipat dari tarif dasar.

"Bila seluruh persyaratan itu dipenuhi, itu akan berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil. Padahal, industri ini menyumbang 25 persen dari surplus perdagangan Indonesia 2005," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada sekitar 10 industri TPT di Bandung, Jawa Barat, mengembangkan pembangkit berbahan bakar batu bara dengan total kapasitas sekitar 226 megawatt, dengan investasi untuk pembangkit batu bara itu sebesar 800.000 dolar AS

per satu megawatt.

API menghitung pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang dibangun 10 industri TPT itu mampu menghemat operasi sebesar 226 megawatt. "Artinya, pemerintah untung karena bisa menghemat subsidi BBM untuk operasionalisasi PLN," kata Ernovian.

Kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang dibangun oleh setiap industri TPT itu minimal 30 megawatt. Hal lain yang dikeluhkan API adalah kebijakan PLN lainnya mengenai program Daya Max Plus dan tarif multiguna yang memberatkan industri TPT karena harus mengalihkan pemakaian listriknya di luar waktu beban puncak.

"Dulu PLN berjanji setelah pembangunan pembangkit listrik di Jatibarang dan Cilacap selesai, kebijakan Daya Max akan dicabut, tapi ternyata sampai sekarang masih berlaku," ujarnya Ismy. (ant)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2007

## 5.000 Warga Kudus Demo Tolak PLTN Muria

Kudus - Sekitar 5.000 warga Kudus, Jawa Tengah, yang terdiri dari para buruh pabrik rokok, buruh transportasi dan warga lainnya, secara bersama-sama berunjuk rasa menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Selasa (12/6) ini.

Oleh  
**SU HERDJOKO**

Mereka menggelar aksi di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, dengan membawa aneka poster dan spanduk yang bertuliskan tentang penolakan PLTN Muria. Bupati Kudus Tamzil hadir dalam demonstrasi tersebut. "Aspirasi rakyat Kudus

akan saya sampaikan kepada presiden. Bila memang rakyat Kudus menolak rencana PLTN itu juga akan kita sampaikan ke sana. Apakah Anda semua setuju menolak PLTN?" tanya Bupati kepada massa, yang kemudian disahut oleh massa secara serempak, "Setuju menolak PLTN!"

Dalam unjuk rasa itu juga hadir ahli turbin nuklir Lilo Sunaryo. Ia memberi penje-

lasan kepada masyarakat soal bahaya radiasi nuklir. Sementara itu, masyarakat mengaku takut tidak bisa berbuat apa-apa kalau nantinya terjadi kebocoran di PLTN Muria.

Rencananya PLTN Muria beroperasi tahun 2016 dengan daya 4.000 megawatt. Demonstrasi tadi berlangsung pukul 07.00-10.00 WIB. Setelah berunjuk rasa di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, massa membubarkan diri dengan tertib kemudian melanjutkan dengan acara seni (*performance art*) di halaman Kantor DPRD Kudus.

Aksi penolakan kehadiran PLTN Muria juga pernah dilakukan minggu lalu di Jepara, dan kemungkinan juga akan dilakukan lagi di Pati dan Rembang. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

# Tahun 2025 Kapasitas PLTP Jadi 9.500 MW

[JAKARTA] Pengembangan potensi panas bumi atau geothermal di Indonesia akan semakin ditingkatkan dalam beberapa tahun mendatang. Pada 2025 pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ditargetkan telah mencapai 9.500 Megawatt (MW) dari total potensi yang ada di Indonesia, yakni 27.000 MW.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan pengembangan potensi geothermal merupakan keharusan, mengacu pada kebijakan energi nasional yang mulai memberi ruang pada pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti bahan bakar minyak. "Potensi geothermal perlu kita kembangkan pada masa-masa mendatang, karena memang ada target sesuai Perpres," ujar Purnomo saat membu-

ka diskusi mengenai panas bumi di Jakarta, Selasa (12/6).

Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan, namun belum dapat dikembangkan secara optimal. Padahal Indonesia memiliki potensi panas bumi cukup besar, sekitar 40 persen dari cadangan dunia. Pengembangan panas bumi sering terkendala masalah lahan, karena lokasi potensi panas bumi umumnya berada di wilayah pegunungan yang sering dikategorikan sebagai hutan lindung atau kawasan konservasi.

Direktur Jendral Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Felix Sembiring mengatakan pengembangan panas bumi akan semakin terdorong, karena adanya tuntutan dunia untuk melaksanakan pembangunan bersih dengan memperbaiki pemanfaatan energi terbaru-

kan yang ramah lingkungan. Dalam waktu dekat, menurut Simon, pemerintah akan menawarkan wilayah-wilayah kerja geothermal dan mengupayakan adanya insentif, terutama pengembangan di wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Pemerintah memperkirakan, investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi panas bumi dalam kurun 2006-2025 secara total mencapai sekitar US\$ 25,9 juta. Dengan investasi tersebut ditargetkan hingga tahun 2025 dapat dibangun PLTP dengan kapasitas 9.500 MW.

#### Insentif

Berdasarkan road map panas bumi, tahun 2006 telah dikembangkan PLTP dengan kapasitas 825 MW. Selanjutnya, karena sa-

at ini juga ada beberapa proyek yang tengah berjalan, pada 2008 ditargetkan kapasitas PLTP akan menjadi 2.000 MW dan pada 2012 meningkat lagi menjadi 3.442 MW.

Berikutnya, dengan perkiraan beberapa wilayah kerja yang saat ini bakal dilelang sudah dapat berproduksi, pada 2016 ditargetkan kapasitas terpasang PLTP di Indonesia akan bertambah menjadi 4.600 MW. "Menjadi 6.000 MW pada 2020 dan akhirnya 9.500 MW di tahun 2025. Pengembangan panas bumi tidak perlu menunggu, cukup mengacu pada UU Panas Bumi yang ada.

Tetapi, saya rasa kita perlu menetapkan soal formula harga (listrik yang dihasilkan dari PLTP), untuk merangsang investor agar lebih tertarik mengembangkan panas bumi," tandas Si-

mon.

Beberapa wilayah kerja panas bumi yang segera dilelang, antara lain di Seulawah Agam (160 MW), Jailolo (75 MW), Telaga Ngebel (120 MW), Gunung Ungaran (50 MW), dan Gunung Tampomas (50 MW).

Dari perkiraan potensi panas bumi di Indonesia, cadangan yang telah diketahui berada di wilayah kerja Pertamina diperkirakan mampu menghasilkan 4.788 MW. Di luar wilayah kerja Pertamina diperkirakan sebesar 1.380 MW.

Potensi selebihnya, sejauh ini belum dieksplorasi. Salah satu bentuk insentif yang dijanjikan pemerintah untuk pengembangan panas bumi, ialah pemerintah akan membiayai eksplorasi detil untuk wilayah Indonesia timur. "Juga adanya kemudahan fiskal dan pajak," ujar Simon. [H-13]

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

## PLN Perlu Targetkan Tingkat Pengembalian Investasi 10-12%

JAKARTA – Pemerintah perlu menargetkan agar PT PLN bisa memperoleh tingkat pengembalian dari biaya yang dikeluarkan dan investasi yang ditanamkan (*rate of return/RoR*) sekitar 10-12% setiap tahunnya, sehingga perseroan bisa berinvestasi membangun pembangkitan dan jaringan listrik baru.

Koordinator Working Group for Power Sector (WGPSR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah tidak perlu menambah subsidi untuk meningkatkan performa keuangan PLN, apalagi dengan memasukkan komponen margin dengan tujuan perseroan bisa meraup keuntungan. Pemberian subsidi dinilainya cenderung tidak efisien, membebani APBN, dan seringkali tidak jatuh kepada masyarakat tidak mampu.

“Saat ini tidak tepat bicara tambahan subsidi, karena realisasinya tidak jelas, yang harus dilakukan pemerintah cukup menetapkan RoR yang wajar. Aneh juga kan, PLN bisa untung karena diberi subsidi dengan memperhitungkan marginnya juga,” ujar Fabby kepada *Investor Daily*, Selasa (12/6).

Menurut dia, tanpa untung pun, apabila PLN mampu mencapai target RoR tersebut, performa keuangan PLN di mata investor akan tetap bagus. Dengan begitu, PLN bisa dipercaya kreditor untuk membiayai proyek-proyeknya.

### Pemerintah Berkukuh

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pemberian margin bagi PLN mutlak diberikan. Dengan memberikan margin, PLN bisa meraup untung dan pada akhirnya bisa mencari pendanaan sendiri untuk membiayai proyek-proyeknya, terutama PLTU 10.000 MW, tanpa harus membebani APBN.

“Perlunya margin adalah agar PLN bisa memberitahukan kepada publik bahwa PLN itu sehat dan bisa mencari pendanaan. Perusahaan sehat itu tercermin dari *financial performance* yang sehat pula, artinya harus untung dan untung ini dipengaruhi subsidi,” katanya, Senin (11/6).

Purnomo menuturkan, untuk proyek PLTU 10.000 MW saja dibutuhkan dana sekitar Rp 100 triliun dengan porsi pendanaan 15% dari ekuitas PLN dan 85% dari kontraktor yang memenangi proyek. Ini artinya, PLN harus menyediakan dana sekitar Rp 15 triliun, belum yang lain-lain. “Kalau bisa sepenuhnya diusahakan PLN, tentu ini tidak akan mengganggu APBN,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Agusman Effendi menuturkan, pihaknya menolak skenario tambahan subsidi listrik bagi PLN dengan memasukkan komponen margin yang diajukan pemerintah. Karena itu, sebelum dilakukan pembahasan, Komisi VII DPR RI akan meminta agar unsur margin dikesampingkan.

“Kami agak kaget, kok di dalam subsidi ada margin. Seharusnya, di dalam subsidi tidak boleh ada margin,” katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI Senin malam (4/6) pekan lalu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro memaparkan empat skenario subsidi listrik untuk tahun 2007. Keempat skenario itu didasarkan margin yang berbeda-beda dengan harga jual listrik rata-rata yang tetap sepanjang tahun Rp 621,53 per kWh.

Skenario pertama adalah kebutuhan subsidi sebesar Rp 30,8 triliun dengan margin 0%, kedua Rp 33,42 triliun dengan margin 2,5%, ketiga Rp 36,03 triliun dengan margin 5%, dan keempat Rp 38,64 triliun dengan margin 7,5%. Skenario tersebut diharapkan bisa disetujui dalam APBN-P 2007 yang akan ditetapkan Oktober nanti.

Asumsi yang digunakan dalam empat skenario tersebut meliputi nilai tukar rupiah Rp 9.100 per dolar AS, inflasi 6,7%, susut jaringan 11,4%, pertumbuhan penjualan listrik 6,66%, dan penjualan tenaga listrik 118,8 TWh. Selain itu, asumsi lainnya adalah konsumsi BBM 8,864 juta kiloliter, gas 186.984 juta btu (*mile-mile british thermal unit/mmbtu*), batu bara 21,844 juta ton, harga minyak mentah US\$ 60 per barel dan biaya pokok penjualan (BPP) Rp 883,75 per kWh.

Dalam APBN 2007 yang disetujui tahun 2006, pemerintah dan DPR telah menyepakati subsidi listrik bagi PLN hanya Rp 25,8 triliun. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	<b>JUN</b>	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 4											TAHUN 2007																			

## LSM MAREM: RADIASINYA MENGANCAM

HINGGA 24 RIBU TAHUN

# PLTN Muria Ditolak, Kudus Bergolak

**Ketegangan dan keletihan menggurat di wajah Lilo Sunaryo, Ketua LSM Masyarakat Rekso Bumi (Marem). Tanda tanya besar dan rasa penasaran pun membayangi benak pria separuh baya bergelar doktor itu. Pasalnya, pemerintah ngotot menggelar pembangunan proyek nuklir yang diperkirakan memakan biaya 1,5 sampai 2 miliar dolar AS itu.**

"BANYAK kepentingan yang bermain. Di antaranya bisnis dengan keuntungan bagi investor. Tapi tentu ada juga yang mencicipi," keluhnya. Dia mengungkapkan adanya sejumlah pejabat pusat dan lokal yang sudah berkunjung ke negara calon investor.

Menurut lembar info yang dikeluarkan oleh Walhi (Wahana lingkungan hidup Indonesia) terkait profil PLTN Muria menyebutkan, dalam sosialisasi yang diadakan oleh Mitsubitshi Heavy Industries (MHI) bersama BATAN pada 17-18 Mei 2004 di Jakarta, terungkap bahwa MHI akan kembali menanamkan investasi untuk pembangunan PLTN di Muria.

Perusahaan yang mengaku berpengalaman dalam suplai ketenagalistrikan di Indonesia menyatakan siap untuk ikut investasi PLTN di Muria. Sebelumnya,

MHI, yaitu NewJec telah menandatangani kontrak untuk studi tapak dan studi kelayakan sampai pertengahan 1996. Setelah menyerahkan dokumen penelitian dilanjutkan oleh Korean Hydro Nuclear Power Co. LTD (KNHP).

KNHP merupakan anak perusahaan KEPCO Korea yang mendapatkan kontrak untuk melakukan *feasibility study* (studi kelayakan) dan pembangunan PLTN Muria di Jepara. Sedianya, pembangunan PLTN ini akan dimulai pada tahun 2011 dengan kapasitas 6.000 MG. Proses ini kemudian dipetieskan karena adanya aksi penolakan, baik di wilayah Jawa Tengah, nasional, maupun internasional.

Namun, pemerintah bersikukuh melakukan pembangunan PLTN Muria. Bahkan, perangkat untuk menjustifikasi bahwa PLTN Muria diperlukan bagi masyarakat terus dilakukan. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah adalah adanya krisis energi listrik yang sudah tidak mencukupi untuk kawasan Jawa dan Bali. Proses sosialisasi terus dilakukan dengan menggunakan hasil riset berbagai kampus tanpa memedulikan aspirasi masyarakat.

Menurut BATAN, PLTN Muria dapat dioperasikan pada tahun 2015 atau paling lambat 2016. Adapun pembangunan akan dimulai tahun 2008 dan proses sosialisasi kepada masyarakat segera dimulai setelah survei lapangan dan riset sikap masyarakat selesai dilaksanakan pada tahun ini.

"Kita ingin prioritaskan hal



Beginilah aksi warga Kudus menolak pembangunan PLTN Muria.

Foto: AUL/RA

yang paling penting. PLTN itu umurnya paling banyak 40 tahun, tapi limbahnya 24 ribu tahun. Inilah yang membuat keresahan masyarakat. Inilah yang menurut kami paling penting,” ujar Lilo Sunaryo.

Menurut Lilo, Jepara hanya butuh 90 MW. “Kenapa kita diberi lebih besar dari itu, PLTN 4 ribu MW itu untuk siapa?” Marem, lanjut Lilo, siap untuk datang kapan pun jika diminta masyarakat guna menyosialisasikan gerakan anti-PLTN.

#### Trauma Chernobyl

Memang, rencana pembangunan PLTN Muria mendapat tanggapan keras dari warga Kudus, Jepara dan Muria. Mereka takut limbah beracun dan tragedi kebocoran nuklir di Chernobyl, Ukraina terulang di daerah mereka.

Sikap keras warga kota kretak itu diwujudkan dalam unjuk rasa ribuan buruh, mahasiswa, Walhi, LSM, Banser NU, dan unsur lainnya, kemarin di alun-alun kota Kudus. Aksi massa juga disaksikan dan didukung Bupati Kudus M Tamzil, Ketua DPRD dan unsur pimpinan daerah lainnya.

Aksi yang sempat membuat kota kretak itu bergolak dimulai dengan orasi berbagai elemen masyarakat. Mereka khawatir nasib anak cucu jika PLTN terealisasi. “Tak ada alasan buat bangun PLTN di sini. Itu sama saja bom waktu waktu membunuh masyarakat di sini,” teriak mahasiswa.

“Kami tolak PLTN. Bupati Kudus tolong tolak PLTN. Kalau tidak kami tak dukung bapak jadi gubernur,” ancam perwakilan Banser yang berorasi. Turut berorasi ahli nuklir Lilo Sunaryo yang juga ketua LSM Marem (masyarakat rekso bumi). Menurut Lilo, umur PLTN paling lama hanya 25 tahun tapi limbah radiasinya mengancam sampai 24 ribu tahun. “Radiasinya bisa membahayakan masyarakat sekitar proyek nuklir. Kalau bocor, meledak akan bisa menghancurkan ratusan kilometer bahkan pulau Jawa,” teriaknya.

“Sumber energi masih banyak belum dikelola profesional, matahari angin, air, kenapa pakai nuklir yang berbahaya,” papar Direktur Walhi Jawa Tengah Arief Zayin.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah Moch As’ad mengatakan para buruh terpanggil turun ke jalan karena nasib mereka ikut terancam. “Jika PLTN Muria jadi dibangun, akan banyak perusahaan yang henggang dari Kudus karena takut radiasi dan berarti akan terjadi PHK besar-besaran.”

Dia menjelaskan, di Kudus ada sekitar 160 ribu pekerja yang mencari nafkah di sejumlah perusahaan seperti PT Djarum, PT Nojorono, pabrik rokok (PR) Sukun, PR Jambu Bol, Pura Group, PT Hartono Istana Electric (Polytron) dan PT Kudus.

Pergolakan masyarakat Kudus dan sekitarnya itu gara-gara pemerintah membuka kembali wacana pembangunan PLTN di semenanjung Muria. Kalau tak ada aral melintang, tahun 2008 Batan Tenaga Atom Nasional (BATAN) akan memulai proses lelang atas megaprojek senilai Rp 76,5 triliun itu.

#### Dunia Usaha Ketakutan

Bupati Kudus HM Tamzil mendukung aksi damai warganya yang menolak rencana pembangunan PLTN Muria. “Saya kira ini perlu untuk ditindaklanjuti. Ini aspirasi masyarakat yang harus kita dukung,” kata Tamzil.

Tamzil juga sempat diminta berorasi sebelum aksi berakhir. Tamzil menyatakan akan membawa aspirasi warganya itu ke pemerintah pusat di Jakarta. Pihaknya juga akan meminta bantuan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah untuk memperjuangkan pembatalan rencana pembangunan PLTN Muria.

“Saya usahakan Senin depan (18/6) akan meluncur ke Jakarta sampaikan langsung ke DPD, ada Pak Budi Santoso, Ibu Nafisah Sahal Mahfud, Pak Sudarto dan Pak Salwani. Beliau-beliau ini yang akan memperjuangkan nanti,” katanya. ■ AUL



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2007

# Nuclear power is cleaner

Otto Soemarwoto  
Bandung

The government's recent announcement that it plans to revive its nuclear power program has renewed the controversy over the long-standing issue. Those in support of the program claim that the price of nuclear-generated electricity is competitive compared to that produced by conventional means and that nuclear power is safe. A study has shown that deaths resulting from every tetrawatt of electricity generated from hydropower are 885, coal 342, gas 85 and nuclear power 8.

In addition, thousands of people are annually killed by air pollution resulting from the burning of coal.

Nuclear power's critics counter that safety statistics should also be compared with wind, solar, microhydro and biofuel alternatives, which are known to be safe.

Energy conservation, such as the replacement of incandescent light bulbs with energy-saving ones and by turning off TVs instead of setting them to "standby" and turning them off and on with a remote control, should also be included in the comparison. Energy conservation is very safe. The death rate should be 0 per TWy saved.

Furthermore, energy saving reduces air pollution, and hence, pollution-related illnesses and deaths. Renewable

energy is a luxury in that it can be developed in isolated villages and small islands to accelerate development in those areas.

In other words, it is well suited for pro-poor development. Small islands have the further bonus that those located at the outermost parts of the country determine the boundaries of the country's sovereignty and exclusive economic zones. To do the same with electricity generated from nuclear power would entail exorbitant costs, because of the requirement for an expensive distribution system.

With respect to global warming as a result of the emission of CO<sub>2</sub>, nuclear power plants are cleaner than gas fired ones. Also on the basis of a life cycle analysis from the mining of uranium and its processing to become fuel and to the operation of the plants, CO<sub>2</sub> emissions are lower from nuclear plants than from conventional ones.

Therefore, nuclear power plants are effective in reducing the threat of global warming, which is now a major environmental concern. While the critics agree with it, they also say that it is only correct when the uranium comes from high grade uranium ores of 1 percent or higher. With lower grades the CO<sub>2</sub> emission increases and at lower than 0.15 percent emissions exceed those from a gas-fired power plant.

Most known ores are of lower grades. When demand for nuclear fuel increases, lower grade ores will subsequently be mined which inevitably will result in more CO<sub>2</sub> emissions. The Oxford Research Group in a 2005 report to the British House of Commons also stated that depending on the grade of the uranium ore the CO<sub>2</sub> emissions ranged from 20 percent to 120 percent.

Hence, there is no assurance that nuclear plants will help in the fight against global warming. In this respect nuclear power is not a sustainable energy form, because nuclear fuel is not a renewable energy. The critics conclude that nuclear power should be considered the last alternative, when all other alternatives have been exhausted.

We can foresee that the controversy will escalate as the plan for the nuclear power plant progresses. Demonstration after demonstration can be expected. We should remember that at the height of the previous nuclear controversy Gus Dur said that he would sleep at the site of the plant to obstruct its construction.

Comparing the benefits and risks of alternatives, which include tangible as well as intangible issues, is a very common method in risk management. The higher the benefit/risk ratio, the higher the acceptability of the alternative and vice versa. The supporters of nuclear power

perceive that the benefits outweigh the risks.

Their perception is that the benefit/risk ratio is high. They enthusiastically support nuclear power development. On the other hand the critics perceive that the benefit/risk ratio of nuclear power plants is low. They reject nuclear power development. If the alternatives of renewable energy and energy conservation proceed well, the electricity crisis, which we are facing now, would be eased.

This would further reduce the benefit/risk ratio of power plants and would stiffen the resistance for its development. More people would line up with the critics in rejecting nuclear power development.

Perceptions of the benefit/risk ratio are subjective, but real and not abstract. It has to be dealt with seriously. However, its management is not a matter of mathematics and technical issues, but of social attitudes.

It lies in the domain of social psychology, which is unfamiliar ground for nuclear plant engineers. The imperative is that social psychologists should be consulted, not to seduce the people to justify nuclear power development, but to manage the controversy in a wise manner.

The writer is professor emeritus of the environment at Padjadjaran University, Bandung. He can be reached at ottooe@attglobal.net.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

# Mega nuclear plant unpopular

**Praful Bidwai**  
Inter Press Service  
Koodankulam, Tamil Nadu

**E**ven as the Indian government gropes in the dark for a coherent policy on energy and the environment, it is rooting hard for a highly unpopular nuclear power project here, close to the peninsula's southern tip.

The project, which involves building six Russian-designed reactors of 1,000 MW capacity each, will be India's biggest nuclear power station.

It faces staunch opposition from the local people, many of them fishermen, who fear it will destroy their livelihoods, gravely endanger their safety, and physically uproot thousands of families.

At stake is the fate of India's grandiose plan to produce as much as 275,000 MW of nuclear electricity (more than twice the existing total power generation capacity) by mid-century, and the issue of granting clearances to potentially hazardous projects which are opposed by the people they are liable to affect adversely.

The conflict over the Koodankulam project came to a head last week with a statutory public hearing on an Environmental Impact Assessment (EIA) report on four proposed new light-water reactors.

The other two reactors, for which an agreement was signed way back in 1988

between president Mikhail Gorbachev of the former USSR and then prime minister Rajiv Gandhi, have been under construction since 2002.

The hearing, mandated by India's Ministry of Environment and Forests (MoEF), is an essential component of the process of approving all major projects with large ecological impacts.

On June 2, more than 2,000 people from Tamil Nadu turned up at the hearing and demanded to speak — despite an intimidating police presence.

The local people, highly literate and aware of the dangers of nuclear radiation, are determined to oppose the project.

They believe the project sponsors are hiding the truth about its hazards, including radiation, future accumulation of large quantities of spent fuel, routine releases of toxic isotopes, and the potential for a catastrophic accident leading to a core meltdown.

Neither the Nuclear Power Corporation (NPC), a subsidiary of India's Department of Atomic Energy (DAE), nor the EIA, even acknowledges any hazards.

The fate of the proposed four reactors at Koodankulam crucially hinges on the United States-India nuclear deal, which is under negotiation, and its approval by the 45-nation Nuclear Suppliers' Group.

If the deal does not go through, or if the NSG does

not clear it by amending its rules, the four reactors cannot be built.

However, uncertainty about the four new units has not dampened the enthusiasm of NPC and the civil administration in demanding that they be approved at once.

"This has further exacerbated tensions between these authorities and the people", says Manju Menon of the environmental group, Kalpvriksh. "Some of these tensions derive from the project's location-specific problems."

First, the Koodankulam plant is being built at the edge of the Gulf of Mannar, one of the world's richest marine biodiversity areas, with 3,600 species of flora and fauna. Thermal discharges from the plant are liable to adversely affect this biological reserve.

Second, three large settlements lie within a five km radius of the plant: Koodankulam (pop. 20,000), Idinthakarai (pop. 12,000), and a new Tsunami (rehabilitation) Colony (pop. 2,000-plus). Its location violates the Department of Atomic Energy's siting norms and a state government order of 1988, which declares a 1.6-km radius around the plant "prohibited".

The next zone, in a five km radius, is a "sterilized area", where "the density of population should be small." Finally, "in the outlying area of 16 km, the population should not

exceed 10,000."

Koodankulam and Idinthakarai are just 2-4 km from the plant as the crow flies. The last row of house built for tsunami victims is less than one km away. More than 70,000 people live within a 16 km radius.

So either NPC will flagrantly violate its own norms, or thousands of families will be brutally separated from their livelihood as fisherfolk.

Third, the plant is being built in a seriously water-stressed area. It will now daily desalinate 48 million liters of seawater — an exorbitantly expensive, unproved, technology. This will send the electricity costs through the roof.

Koodankulam is also fraught with problems generic to nuclear power, including generation of radioactive waste, routine releases of radioactivity, and the possibility of catastrophic accidents like Chernobyl.

Thus, the plant will generate large amounts of highly radioactive spent fuel. It will routinely release radioisotopes like iodine-131 and noble gases. It will expose hundreds of occupational workers to high doses of radiation — a silent, invisible poison that causes cancers and genetic deformities.

The reactors are also vulnerable to catastrophic core meltdowns that will affect India's southern states and even Sri Lanka.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007

## Thailand Bangun Pembangkit Nuklir

**BANGKOK (SINDO)** – Badan Pembangkit Listrik Thailand (EGAT) berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negeri itu. Proyek senilai USD6 miliar tersebut diperkirakan mulai beroperasi pada 2020.

Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang akan memproduksi listrik sebesar 4.000 megawatt ini ditujukan untuk memenuhi keterbatasan sumber energi. "Pembangunan PLTN tidak dapat dihindari oleh Thailand yang sekarang menghadapi permintaan listrik yang terus meningkat," ungkap Gubernur EGAT Kraisi Kanasuta, kemarin.

Thailand saat ini menggunakan gas alam untuk memenuhi 70% kebutuhan listriknya. Sisanya berasal dari minyak, batu bara, dan tenaga air. Sepertiga gas alam yang digunakan di Thailand diimpor dari Myanmar dan Kraisi. EGAT khawatir harga gas alam akan terus melambung seiring keterbatasan cadangan tersebut. Thailand menghabiskan USD26 miliar untuk impor energi tahun lalu yang berarti meningkat 16%.

Untuk membiayai pembangunan PLTN, EGAT mempertimbangkan pinjaman dari investor dalam dan luar negeri. Mereka akan merekrut teknisi Thailand untuk mempelajari teknologi nuklir di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang.

"Bahan bakar nuklir itu bisa berasal dari Australia, Kanada, atau Afrika Selatan," ungkap juru bicara Kementerian Energi Thailand.

Tetapi pakar lingkungan menentang rencana tersebut. Mereka berdalih pembangunan PLTN ini memerlukan biaya mahal. Namun, argumen itu disanggah oleh Kraisi. "Meskipun total biaya investasinya tinggi, PLTN lebih murah dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam perhitungan biaya produksi per unit," ujar Kraisi.

(AFP/CNA/syarifudin)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2007

## PLN Cabut Listrik Puluhan Rumah Warga

**BEKASI (SINDO)**—PLN Bekasi melakukan pemutusan sambungan listrik terhadap 48 rumah warga di Perumahan Griya Kota Bekasi, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Pemutusan ini dilakukan karena pengembang perumahan tersebut melakukan sambungan listrik ilegal (mencuri tenaga listrik).

Aksi ini dilakukan dengan mengerahkan 60 petugas penertiban pemakaian tenaga listrik, dibantu puluhan petugas Polres Bekasi. Para petugas datang dengan menggunakan 12 unit mobil dinas PLN. Mereka langsung menuju perumahan yang dibangun PT Griya Bangun Bersama.

Saat ditelusuri, dari 55 KK yang menempati perumahan tersebut, hanya tujuh yang menggunakan sambung listrik resmi dari PLN. Selebihnya, atau 48 KK menggunakan sambungan listrik ilegal. "Anda bisa lihat, rumah warga di tempat ini tidak memiliki meteran listrik dari PLN. Buktinya, tanpa melalui alat ukur kwh dengan daya 1.300 watt per rumah," ujar Kepala APJ PLN Babelan, Bekasi Mohammad Shodiq.

Selain membahayakan, penyambungan listrik ini membuat kerugian besar bagi PLN. Shodiq menjelaskan, kerugian yang dialami PLN selama penggunaan enam bulan mencapai Rp113 juta.

Menurut Shodiq, listrik bisa dipasang kembali setelah warga membayar denda selama enam bulan, yakni Rp2 juta per rumah warga. Menurut Shodiq, selama operasi P2TL Januari–Mei 2007, PLN telah mengalami kerugian mencapai Rp5 miliar akibat pencurian listrik di kawasan Kota/Kabupaten Bekasi.

Pipit, 26, salah seorang penghuni rumah, mengaku tak tahu-menahu jika listrik yang digunakan itu ilegal. Sejak menempati rumah dua bulan lalu, ibu dua anak ini hanya membayar Rp50.000. Itu pun untuk penyambungan listrik tersebut. "Selama enam bulan ini, saya tidak pernah membayar listrik karena belum mempunyai rekening listrik," tukasnya.

Sebelumnya, Pipit bersama warga lainnya telah mengajukan permintaan kepada pengembang untuk memberikan meteran listrik. Namun, pihak pengembang hanya menjanjikan. "Saya dan warga lain pasti akan meminta pertanggungjawaban pengembang agar aliran listrik dapat kembali seperti semula," janjinya.

Sementara Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Bekasi Iptu Muchson AR mengatakan, puluhan meter kabel listrik telah disita sebagai barang bukti penyelidikan. Muchson berjanji akan memanggil pihak pengembang dan orang yang terlibat dalam melakukan penyambungan listrik ke rumah warga tersebut. "Kasus ini sedang diselidiki." (wahab f)



**CABUT:** Seorang pekerja melakukan pemutusan aliran listrik di perumahan Griya Kota Bekasi, Teluk Pucung, Bekasi Utara, kemarin.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2007

**Sambungan Listrik 40 Rumah Diputus**

Sedikitnya 40 keluarga di kompleks Perumahan Griya Kota Bekasi, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, terancam tanpa penerangan listrik untuk beberapa hari mendatang, karena aliran listrik ke rumah mereka diputus petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan Bekasi, mulai Selasa (12/6). Pemutusan dilakukan karena sambungan listrik yang dipasang ke rumah warga itu liar dan dianggap pencurian listrik. Manajer PT PLN Bekasi M Shodiq menyebutkan, selain merugikan PLN dan pemilik rumah, pemasangan sambungan listrik itu berbahaya. (COK)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 115

TAHUN 2007

## Belum Bayar Listrik, Halte Busway Gelap

JAKARTA — Akibat belum membayar tagihan listrik, sejumlah halte busway di Jakarta mengalami pemadaman. "Pembayaran kami memang telat," kata Drajad Adhyaksha, Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta, kepada *Tempo* kemarin.

Menurut dia, keterlambatan itu terjadi karena sistem pembayaran sedang dalam masa transisi. Sebelumnya, pembayaran dilakukan oleh Penerangan Jalan Umum (PJU). "Baru tahun ini BLU yang membayarnya," ujar Drajad.

Selain itu, di menambahkan, anggaran baru turun pada April lalu. "Jadi perlu proses untuk membayar. Sekarang sedang dalam proses administrasi," ucap Drajad.

Untuk beberapa halte, pembayaran tagihannya sudah diselesaikan. Namun, ia mengaku tidak hafal jumlahnya. Meski sudah dibayar, kata dia, tidak otomatis listrik menyala. "Kami telah mengirim surat ke PLN agar halte yang sudah dibayar segera dinyalakan," ujarnya.

Dari pantauan *Tempo*, lis-

trik di halte busway Masjid Istiqlal kemarin malam padam. Untuk penerangan di sana digunakan lilin. "Sudah sebulan mati listrik. Kami patungan untuk beli lilin," kata Wardoyo, petugas loket busway.

Pemadaman listrik dilakukan karena pengelola Transjakarta menunggak tagihan listrik sejak sebulan lalu. Dia sudah melaporkan kejadian itu kepada pengelola, tapi hingga kini belum ada tanggapan.

Dalam semalam, kata Wardoyo, mereka menghabiskan satu kotak lilin berisi 10 batang seharga Rp 5.000. Lilin tersebut digunakan untuk operasionalisasi busway pada pukul 18.00-20.00 WIB. Di halte itu tersedia genset, tapi tidak digunakan. "Saya tidak tahu kenapa," katanya.

Menurut Wardoyo, pemadaman listrik di halte yang menjual sekitar 200 tiket per hari itu sebenarnya tidak mengganggu operasionalisasi, karena tidak ada alat elektronik di sana, kecuali mesin penyejuk udara. "Cuma tidak nyaman," ucapnya.

● INDIRIANI DYAH S | SOFIAN

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN : 4											TAHUN 2007

# PT BRIL Buka Peluang Warga Bekerja di PLTSa

## Dada Rosada Minta Tim Sosialisasi Segera Bekerja

**BANDUNG, (PR).-**

Meski operasional pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di wilayah Gedebage, Kota Bandung, berbasis teknologi tinggi, PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL), membuka peluang bagi warga sekitar untuk bekerja di lingkungan PLTSa berkapasitas 7 megawatt itu.

Demikian dikemukakan Direktur PT BRIL, investor PLTSa tersebut, Yoseph Sunaryo, dalam ekspose PLTSa bersama konsultan dari Cina IPPR International Engineering Corporation (CIPPREC), di Ruang Tengah Balai Kota Ban-

dung, Selasa (12/6).

Menurut dia, PLTSa Gedebage setidaknya membutuhkan 120 tenaga kerja, 20 di antaranya tenaga ahli yang diharapkan berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sebagai pembangkit listrik yang menggunakan teknologi tinggi, sebenarnya PLTSa tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Standar baku mutu polutan juga dikontrol dengan sistem terkomputerisasi. "Jadi kalau ada yang di atas baku mutu, mesin langsung berhenti, dan begitu seterusnya," ungkapnya.

Kendati begitu, Yoseph

membuka peluang bagi warga sekitar yang ingin bekerja di PLTSa, namun tidak memiliki keahlian khusus seperti yang dibutuhkan. "Masih banyak tenaga yang kami butuhkan, misalnya untuk membuat batako dari *bottom ash* (abu) yang dihasilkan dari proses PLTSa, memelihara kebun, satpam, penjaga danau, dan lain-lain," tuturnya.

Khusus untuk pemenuhan kualifikasi jabatan staf ahli PLTSa, Yoseph akan memberangkatkan sekitar 20 insinyur dari Indonesia untuk memperoleh pelatihan di Cina.

Ekspose PLTSa itu dihadiri Asisten Presiden CIPPREC, Mr. Chen Hong Bin beserta jajarannya, Wali Kota Bandung, Dada Rosada didampingi para kepala dinas, dan tim studi ke-layakan dari ITB.

Menurut Yoseph, CIPPREC adalah satu dari dua peny-

plai teknologi untuk PLTSa yang akan dibangun di Bandung. Perusahaan sebelumnya berasal dari Hang Zhou juga sudah memaparkan konsep PLTSa di hadapan wali kota.

### Sosialisasi

Pada kesempatan itu, Dada Rosada kembali memerintahkan Tim Sosialisasi PLTSa untuk segera bekerja. Dada mengatakan, tim yang dikomandani Kepala Bapeda Kota Bandung, Tjetje Subrata itu telah melakukan studi cara melakukan sosialisasi PLTSa ke Prancis.

Tjetje mengatakan, penolakan terhadap PLTSa di Prancis terus terjadi sejak tahun 1970-an. Kini, ia mengaku tengah mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi. Ia pun meminta PT BRIL dan ITB bisa turun langsung di tengah warga untuk menyosialisasikan aspek teknisnya. (A-156)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

## Maraknya Sambungan Liar Rugikan PLN



DEWIYATINI/PR

PETUGAS dari APJ PLN Bekasi memutus sambungan liar di Perumahan Griya Bekasi Kota, Kp. Irian, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa (12/6). Terdapat 48 rumah yang melakukan "bypass" aliran listrik tanpa kwh meter.\*

### BEKASI, (PR).-

Maraknya pemasangan sambungan liar listrik baik di rumah-rumah, industri, dan penerangan jalan umum (PJU) menyebabkan PLN Bekasi mengalami kerugian sekitar Rp 5 miliar di tahun 2007 ini.

Di tahun 2007, APJ PLN Bekasi menargetkan penurunan susut akibat pencurian listrik sebesar 120 juta kwh. Jumlah itu lebih tinggi dari 2006 yang menargetkan penurunan susut hingga 50 Juta kwh. Salah satu

upaya dengan melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di beberapa daerah yang diduga terdapat sambungan liar.

Misalnya saja, pelaksanaan P2TL di Perumahan Griya Bekasi Kota yang terletak di Kp. Irian, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa (12/6). Petugas menemukan 48 sambungan listrik liar dari 55 rumah yang baru dihuni di perumahan tersebut.

Warga yang menghuni pe-

rumahan tersebut mengaku telah membayar biaya pemasangan kwh meter kepada pihak pengembang, namun hingga di datangi oleh petugas PLN Bekasi, masih belum juga terpasang.

Setelah diperiksa oleh petugas PLN, pemakaian tenaga listrik secara ilegal itu telah berlangsung sekitar 6 bulan. Sehingga, tanpa membayar biaya pemakaian listrik, para penghuni perumahan tersebut dapat menikmati berbagai fasilitas dari sambungan liar yang terpasang.

Namun, pihak pengembang, PT Griya Bangun Bersama (GBB) tidak memenuhi undangan PLN Bekasi ketika 100 petugas PLN memutus aliran listrik melalui sambungan liar tersebut. Meskipun tanpa kedatangan pihak pengembang, para petugas tetap memutusnya. Artinya, warga akan menjalani hidup tanpa penerangan mulai Selasa (12/6) malam.

"Selain gelap, kita juga bakal susah dapat air. Soalnya warga di sini memakai pompa air listrik semua," kata Tini (28) yang mulai mengkhawatirkan kesulitan yang ia dapat setelah memutus listrik tersebut. Namun, ia tidak merasa mencuri listrik, karena ketika ia menem-

pati perumahan tersebut telah memenuhi semua kewajibannya terhadap pengembang.

Demikian pula dengan penghuni lainnya. Mereka dibebani sekitar Rp 50-100 ribu untuk pemasangan kwh meter yang masih belum dipasang oleh pengembang.

### Didenda

Atas pencurian listrik tersebut, PLN Bekasi mengalami kerugian sebesar Rp 113,4 Juta dengan susut aliran listrik sebesar 229.152 Kwh, sehingga bagi pelanggarnya, APJ PLN Bekasi akan menetapkan sanksi berupa denda. "Hanya saja masih harus diperiksa denda itu akan dijatuhkan kepada siapa," ujar Manajer APJ PLN Bekasi, M. Shodiq. seraya berharap masyarakat dapat menolak segala bentuk jasa penghematan pemakaian listrik secara ilegal.

Sedangkan, Asisten Manajer Niaga, Didik S. Yuwono, pengembang tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk meraup keuntungan dengan mencuri listrik. Ia tidak menampik bahwa developer "nakal" tersebut tidak hanya mencuri listrik. "Kemungkinan mereka juga membeli alat-alat kelengkapan instalasi listrik secara ilegal," katanya. (A-153)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

## RI to put five geothermal projects out to tender

Ika Krismantari  
*The Jakarta Post/Jakarta*

The government will invite bids in August for five geothermal projects as part of the effort to boost electricity supply in less-developed regions, says an official.

The projects will have an estimated combined capacity of 455 megawatts (MW), comprising 160 MW in Seulawah, Nanggroe Aceh Darussalam, 75 MW in Maluku, 120 MW in Telaga Ngebel, East Java, 50 MW in Ungaran, Central Java, and 50 MW in Tampomas, West Java.

The Energy and Mineral Resources Ministry's director general of geology and mineral resources, Simon Sembiring, said Tuesday that the ministry was awaiting a ministerial decree that would set out general provisions and tendering procedures for the geothermal business as a whole.

The decree was likely to be issued next month, Simon said, and after that the Finance Ministry was expected to complete its discussions on how much geothermal energy promoters would have to pay in royalties.

The government has also

formed a team tasked with coming up with a formula to determine an economically feasible ceiling price for both investors and the sole power purchaser — state-owned electricity firm PT PLN.

The establishment of the team comes in response to investor complaints about the price set by PLN, which stands at around 4.5 U.S. cents per kilowatt. They argue that this price is significantly lower than the estimated minimum economic price of 6.5 U.S. cents.

Simon said that the investors would be able to reopen negotiations with

PLN based on the price determined in accordance with the new formula.

However, Herman Darnel Ibrahim, PLN transmission and distribution director, insisted his firm would not be able to offer a higher price.

"We could consider offering a higher price only if the government decides to subsidize the distribution of electricity generated from geothermal energy," Herman said.

Also in relation to the pricing issue, the promoters are also concerned about the designation of PLN as the sole purchaser, thus placing the promoters in a

weaker position.

"We don't have anything to offer. If they (PLN) want it at that price, what can we do? We can't sell it to anyone else as PLN is designated the sole buyer.

"We also need a return on our investment," said Dan Johnson, the president director of geothermal firm Binatek Reka Energi, which own a 10-megawatt project in Gorontalo, Central Sulawesi.

Indonesia, which has the geothermal energy potential to produce over 27,700 megawatts of electricity, or 40 percent of the world's reserves, has only seven geot-

hermal plants with a combined capacity of a mere 852 megawatts.

The U.S. boasts geothermal plants with a combined capacity of 2,100 MW, the Philippines 1,775 MW and Mexico 975 MW.

Meanwhile, Pertamina director for geothermal energy Bambang Kustono said the state oil and gas firm is set to spend \$22.5 million on drilling two new wells at a geothermal plant in Lumutbalai, South Sumatra, and three wells in Ulubelu, Lampung.

The drilling work is scheduled to be completed in 2008.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN : 7											TAHUN 2007

## PLN Putus 48 Sambungan Listrik Ilegal

BEKASI — Area Pelayanan Jaringan (APJ) PLB Bekasi terpaksa memutus 48 sambungan listrik di Perumahan Griya Kota Bekasi, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Tindakan ini dilakukan PLN lantaran pengembang perumahan itu diduga melakukan sambungan listrik secara ilegal.

Pemutusan sambungan listrik ini dilakukan oleh sekitar 60 petugas penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) APJ Bekasi. Sejumlah petugas Polrestro Bekasi turut mengamankan proses pemutusan ini. Manajer APJ Bekasi, Muhammad

Shodiq menyatakan ke 48 rumah tersebut tidak memiliki meteran listrik resmi dari PLN. "Dari 55 rumah, hanya tujuh rumah yang aliran listriknya resmi dari PLN," kata dia. Shodiq menambahkan, puluhan rumah warga itu sengaja menyambung listrik secara ilegal tanpa menggunakan alat ukur *kilo watt hour* (kWh) dengan daya 1.300 watt per rumah.

Akibat kondisi ini, lanjut Shodiq, PLN menderita kerugian cukup besar. Selama enam bulan terakhir dari 48 rumah itu saja, PLN rugi sebesar Rp 113 juta. Kerugian dihitung dari

jumlah rumah yang mencuri listrik selama enam bulan sebanyak 4.774 kWh dikalikan Rp 495.

Atas kejadian ini, warga dan pengembang mesti membayar denda atas pemakaian listrik secara ilegal selama enam bulan. Besarnya denda Rp 2 juta per rumah. Sayangnya, saat dilakukan penertiban, pihak pengembang tidak menunjukkan batang hidungnya. Padahal PLN sudah mengundangnya untuk datang ke lokasi penertiban.

Shodiq menambahkan dari operasi P2TL sejak Januari 2007 hingga

Mei 2007, PLN menderita kerugian sebesar Rp 5 miliar. Ini akibat dari pencurian listrik di kawasan Kota maupun Kabupaten Bekasi.

Pipit (26 tahun), salah seorang warga yang aliran listriknya diputus mengaku tidak mengetahui jika selama ini aliran listrik yang dinikmatinya adalah listrik ilegal. Menurutnya, selama ini ia telah membayar biaya penyambungan listrik sebesar Rp 50 ribu. "Selama ini saya memang tidak pernah membayar listrik karena belum mempunyai rekening listrik," kata dia. ■ cep

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2007

### Pembangunan PLTN Muria Ditolak

KUDUS — Ribuan warga Kudus, Jawa Tengah yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menggelar unjukrasa menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria.

Aksi damai yang digelar di Alun-alun Simpang Tujuh, Kudus, Selasa, juga diikuti sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti PMII, HMII, BEM STAIN, Walhi,

Marem, Banser, KNPI.

"Kami berharap pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membatalkan rencana pembangunan PLTN Muria. Kalau rakyat menolak, untuk apa ngotot?" kata Ketua DPC KSPSI Kudus Mochamad Asad yang juga koordinator aksi.

KSPSI memotori aksi tersebut, kata Asad, karena selain mengangap PLTN berbahaya bagi manusia dan lingkungan, juga akan membuat pelaku usaha henggang dari Kudus, juga daerah sekitarnya.

"Kalau ini terjadi, maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal. Buruh anggota KSPSI Kudus saja mencapai 160 ribu orang," kata Asad yang juga Ketua KSPSI Jawa Tengah tersebut. ■ ant/fir

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 28

TAHUN 2007

## Persyaratan PLN Hambat Industri Buat Pembangkit

JAKARTA, (PR).-

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai sejumlah persyaratan yang ditetapkan PLN menghambat kalangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) membangun pembangkit listrik sendiri. Padahal, pemerintah menggalakkan kalangan industri khususnya TPT mengembangkan pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan bahan bakar alternatif yaitu batu bara.

Sekretaris Eksekutif API, Ernovian G. Ismy, di Jakarta, Senin, mengatakan industri TPT yang akan membangun pembangkit harus memiliki izin usaha kelistrikan sendiri. "Mengurus syarat perizinan ini yang sangat susah. Pokoknya semua persyaratan PLN itu sangat memberatkan sehingga kami tidak mungkin mengembangkan pembangkit sendiri," ujarnya.

Persyaratan yang dinilai memberatkan itu antara lain kewajiban membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU) sebesar 2,5% untuk industri yang sudah menggunakan listrik dari pembangkit sendiri. Selain itu, PLN juga mengeluarkan syarat bahwa penggunaan pembangkit tidak boleh paralel dengan yang dimiliki PLN.

Bila ketahuan, industri TPT yang memiliki pembangkit pa-

ralel dengan yang dimiliki PLN akan dikenakan sanksi lima kali lipat dari tarif dasar. "Bila seluruh persyaratan itu dipenuhi berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil. Padahal, industri ini menyumbang 25% dari surplus perdagangan Indonesia 2005," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada sekitar 10 industri TPT di Bandung, Jawa Barat, mengembangkan pembangkit berbahan bakar batu bara dengan total kapasitas sekitar 226 megawatt, dengan investasi untuk pembangkit batu bara itu sebesar 800.000 dolar AS per satu megawatt. API menghitung pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang dibangun 10 industri TPT itu mampu menghemat operasionalisasi PLN sebesar 226 megawatt.

"Artinya, pemerintah untung karena bisa menghemat subsidi BBM untuk operasionalisasi PLN," kata Ernovian. Kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang dibangun oleh setiap industri TPT itu minimal 30 megawatt.

Hal lain yang dikeluhkan API adalah kebijakan PLN lainnya mengenai program Daya Max Plus dan tarif multiguna yang memberatkan industri TPT karena harus mengalihkan pemakaian listriknya di luar waktu beban puncak. (A-34/ant)\*\*\*

24

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 23

TAHUN 2007

# 160.000 Buruh di Kudus Tolak PLTN

## Bupati Kudus Dukung Penolakan

KUDUS, KOMPAS — Selama beberapa jam, Kota Kudus, Selasa (12/6), diwarnai demo ribuan warga yang menolak rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara. Demo tersebut didukung sepenuhnya oleh Bupati Kudus M Tamzil.

Di sepanjang jalan protokol, di sebagian besar pohon penghijauan tertempel tulisan "Tolak PLTN". Aksi itu tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas atau mengganggu aktivitas warga.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Masyarakat Muria berjumlah lebih dari 5.000 organisasi, yang mewakili sekitar 160.000 buruh se-Kabupaten Kudus, sebagian besar perempuan buruh rokok, sejak pukul 08.00 memasuki Alun-alun Simpang Tujuh.

Selain mereka, tampak perwakilan badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, KNPI, Banser, dan sejumlah LSM.

Para buruh itu sudah mendapat izin dari pihak perusahaan mereka untuk ikut aksi menolak PLTN. Mereka bahkan tetap mendapatkan haknya atas upah harian Rp 25.000 per buruh.

Mereka diantar menuju lokasi dan kembali ke perusahaan dengan menumpang truk.

### Bupati mendukung

Kehadiran Bupati Kudus M Tamzil yang mendukung penolakan rencana pembangunan PLTN membuat massa bertambah semangat.

"Jika memang sebagian besar rakyat menolak PLTN, pemerintah sebaiknya bersedia mendengarkan, mengkaji ulang, dan bahkan membatalkannya," tegas Bupati Tamzil.

Di podium, selain Bupati Kudus, tampak pula anggota Mus-

### RENCANA PLTN MURIA

- ◆ Lokasi tapak: Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
- ◆ Mulai pembangunan fisik: 2010
- ◆ Produksi: 4 x 1.000 Megawatt untuk memasok Jawa-Bali
- ◆ Perkiraan biaya: Rp 35 triliun

Sumber: dokumentasi Kompas

pida dan Ketua DPRD, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng/Kudus Moch As'ad, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) Nawawi Rusdy, dan Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Juffan.

Sementara itu, di halaman depan kompleks gedung DPRD Kudus, ratusan seniman, budayawan, anggota LSM Masyarakat Reksa Bumi (Marem), dan masyarakat peduli lingkungan menggelar drama teatrikal "Mummy Korban Nuklir".

Tenda keprihatinan yang mereka dirikan sejak pertengahan Mei 2007 lalu dan akan dibongkar pada 17 Agustus nanti masih diisi berbagai kegiatan yang terkait dengan PLTN.

Mereka juga menggelar kain putih sepanjang lebih dari 100 meter. Kain itu berisi berbagai tuntutan dan protes serta kepedulian masyarakat yang ditu-

angkan dalam bentuk tulisan tangan.

Di alun-alun Simpang Tujuh, massa lebih dahulu dihibur dengan kehadiran Orkes Pusi Sampak GusuRan pimpinan Anis Sholeh Ba'asyin.

### Petisi kepada Presiden

Dalam acara itu juga disampaikan sejumlah orasi, dan puncaknya ketika KSPSI menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Presiden dan akan diserahkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan DPR melalui Bupati Kudus.

Isi petisi hanya satu, yaitu rencana membangun instalasi PLTN di Semenanjung Muria harus dibatalkan.

Mereka juga meminta pemerintah pusat segera mengkaji sumber energi alternatif yang lebih aman bagi kehidupan manusia dan lingkungan, seperti energi surya dan angin.

Penolakan tersebut, menurut As'ad, didasari berbagai pertimbangan, antara lain dampak buruk PLTN bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup di darat, air, maupun udara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kemudian bagi kesehatan manusia, PLTN dipastikan menyimpan potensi berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan karena terbukti telah membunuh banyak manusia seperti tragedi Chernobyl di Rusia pada awal 1990-an.

Keberadaan PLTN juga tidak menguntungkan bagi iklim investasi karena terdapat risiko keamanan.

Pada proses pembangunan PLTN juga akan dilakukan relokasi sejumlah industri di sekitar lokasi PLTN yang bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja sehingga akan menambah jumlah pengangguran. (SUP)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

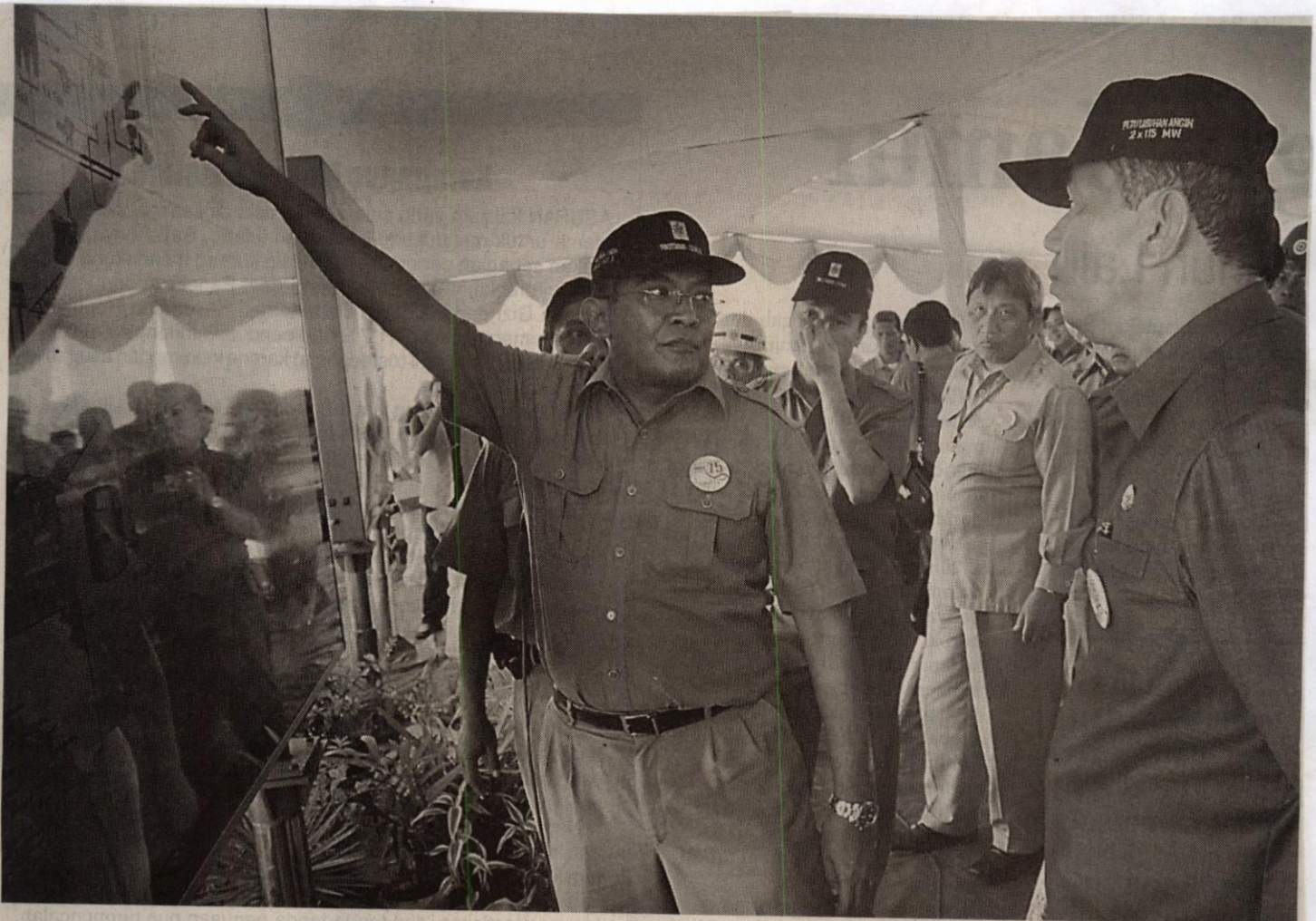
MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2007



■ DOK PLN

**PEMBANGUNAN PLTU LABUAN**

Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono menjelaskan kepada Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing (kanan), anggota DPRD Tapanuli Tengah dan Komisi D DPRD Sumatra Utara rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Labuhan Angin yang berkapasitas 230 MW (2X115 MW) sesuai meresmikan pemasangan drum broiler unit 1 PLTU Labuhan Angin, di Labuan, Sumatra Utara, pekan lalu. PLTU tersebut selesai dan masuk sistem interkoneksi Sumatra 150 kV pada 2008.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.8

TAHUN 2007

# Warga Jepara Tolak PLTN Muria



"Jangan cuma  
dikhawatirkan dampak  
buruknya."

**KUDUS** — Ribuan warga Kudus yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muria menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria kemarin. Aksi yang dipusatkan di Simpang Tujuh, Kudus, ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, anggota Dewan, sejumlah direksi perusahaan rokok, dan Bupati Kudus Moh. Tamzil.

Mereka khawatir, jika reaktor nuklir tersebut sampai bocor, itu bukan saja membunuh ribuan jiwa, melainkan juga berdampak terhadap anak-cucu mereka. "Apa pun risikonya, kami tetap menolak," kata Mohamad As'ad, koordinator warga. Proyek senilai Rp 76,5 triliun itu rencananya akan mulai dikerjakan tahun depan.

Aksi itu dilanjutkan dengan membuat pernyataan sikap

yang diserahkan kepada Bupati Kudus Moh. Tamzil untuk disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami siap menyampaikan aspirasi warga," kata Tamzil di tengah warga yang menggelar unjuk rasa. Tamzil mengatakan, secara pribadi dia juga menolak rencana pembangunan PLTN tersebut.

Tamsil mengatakan bisa memahami kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan reaktor bocor. Mereka meragukan janji pemerintah yang menjamin reaktor tidak bocor. Penyebabnya adalah kultur disiplin yang kurang dalam menjalankan standar keamanan. "Jangan samakan dengan Jepang yang sangat disiplin," katanya.

Ahli energi dan Ketua Masyarakat Reksa Bumi, Lilo Sunaryo, yang ikut dalam aksi itu menyatakan PLTN tidak memberikan jaminan keamanan bagi manusia dan lingkungan. Perbandingan reaktor nuklir yang tidak bocor dengan yang bocor adalah 1 : 1 juta. "Tapi kenyataannya adalah 6 : 432 dari PTLN di dunia bocor,"

katanya.

Lilo menyatakan dia melihat langsung dampak bocornya reaktor nuklir di Chernobyl dan Dubna di Rusia. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah mengalihkan proyek PLTN ke pembangkit listrik yang lain, seperti tenaga uap. Dengan kapasitas yang sama, daya yang dihasilkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan PLTN.

Apalagi berdasarkan studi Australian Nasional University pada 1996, jika PLTN Muria ini sampai bocor, bahan radioaktifnya akan menyebar ke seluruh kawasan Asia dan Australia. "Radius bahan radioaktif itu 70 kilometer dan pengaruh buruknya sampai tujuh turunan," kata Lilo.

Sementara itu, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Hudi Hastowo menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena proyek ini sudah melalui kajian yang mendalam. Dia ingin warga memahami proyek ini secara utuh. "Jangan cuma dikhawatirkan dampak buruknya," katanya. ● BANDELAN AMARUDDIN